

Efforts To Equalize Education In Remote Areas

Upaya Dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil

Ketut Aries Indrayani^{1*}, Musdarwinsyah², Basilius Redan Werang³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: aries.indrayani@student.undiksha.ac.id

Article info

Keywords:

Education,
Inequality,
Policy

Abstract

Education plays a crucial role in the human life cycle. One of the main factors contributing to inequality is the unequal access to education in Indonesia. This study aims to determine the efforts made by the Indonesian government to address the inequality in educational equality in remote areas of Indonesia. The research method used in writing this article is a literature study method regarding increasing equal access to education in remote areas. Zed, in his research, stated that a literature study method is a series of activities carried out by collecting data in libraries, reading and taking notes, and managing research materials. The results of the study explain that unequal access to education in Indonesia, especially in remote areas, has had a broad impact on economic backwardness and social inequality. Efforts that must be made to address the factors causing unequal education in Indonesia include improving the quality and quantity of teachers, building schools in several remote areas, providing a basis for guaranteeing, providing and protecting the rights of citizens, especially in the world of education in accordance with Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 39 of 1999. The government together with several private organizations have attempted to reduce disparities in remote areas through various policy programs, SM-3T, increasing economic productivity and social welfare and Indonesia Mengajar. With synergy between various parties, it is hoped that educational inequality in Indonesia can be reduced, and access to quality education can be enjoyed by all people, including in remote areas.

Kata kunci:

Pendidikan,
Ketimpangan,
Kebijakan

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu hal yang memegang peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Salah satu faktor utama yang menjadi ketimpangan yaitu belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal yang belum menikmati pendidikan yang setara dengan daerah-daerah lain. Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap ketimpangan pemerataan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi literatur mengenai peningkatan kesetaraan akses pendidikan di daerah terpencil. Zed dalam penelitian mengatakan bahwa sebuah metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dalam pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia,

terutama di wilayah terpencil, telah berdampak luas pada keterbelakangan ekonomi dan ketimpangan sosial masyarakat. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasarasan untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No 39 tahun 1999. Pemerintah bersama beberapa organisasi swasta telah berupaya mengurangi kesenjangan di daerah terpencil melalui berbagai program kebijakan, SM-3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, Terpencil), peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dan Indonesia Mengajar. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat berkurang, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Setelah kasus jembatan miring di Lebak, Banten dan kasus di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang. Kasus Jembatan miring juga ada di Desa Kangeran, Pamekasan, Jatim. Di jembatan inilah, warga yang akan pergi kerja atau sekolah, mempertaruhkan nyawa termasuk para pelajar terpaksa harus melintas jembatan tersebut karena merupakan akses terdekat ke tempat tujuan (Bahri, 2025).

Pendidikan tidak hanya memotori ilmu dan pengetahuan, melainkan juga sebagai pembentuk karakter seorang individu agar dapat menjadi pribadi yang bijaksana, dan sadar akan kemampuan potensi yang terdapat dalam dirinya. Menurut Maulido, *et al* (2024) pendidikan tidak sebatas memperkuat aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan spiritual dalam pembentukan individu secara menyeluruh. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya.

Pendidikan adalah salah satu hal yang memegang peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Pendidikan adalah suatu tahap dalam mengubah sikap, perilaku, tingkah laku manusia agar dapat memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kecerdasan dan spiritual yang dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain (Septiana, 2024). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 mengatur bahwa merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 (b) menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan berawal dari permasalahan yang mendasar yakni: Pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan memadai. Kedua, kondisi geografis antara pulau satu dengan pulau lainnya memiliki jarak tempuh yang lama, sering kali akses jalan yang ditempuh hanya dapat menggunakan jalur laut untuk sampai ke sekolah. Ketiga, hambatan sosial dan budaya seperti konstruksi sosial

yang menganggap pendidikan bukan menjadi hal yang penting dan sebagainya. Keempat, keterbatasan guru. Kondisi ini, sering kali menjadikan tiga Mata Pelajaran (Mapel) yang berbeda diampu oleh guru yang sama dikarenakan jumlah guru dalam lingkungan sekolah tersebut tidak mencukupi. Kelima, guru dengan kualitas rendah. Fenomena guru yang pilah-pilih tempat mengajar acapkali dilakukan. Mayoritas guru kebanyakan mengajar di daerah perkotaan sementara sangat sedikit guru dengan sukarela mengajar di daerah terpencil. Hal ini menjadikan sumber daya guru yang cakap sering kali ditemukan di kota besar (Maulido *et al*, 2024; Rahmadi, 2020).

Pendidikan memiliki peranan krusial dalam pengembangan sumber daya manusia. Ditengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar. Hal ini terlihat dari adanya transformasi dalam aspek sosial budaya, dinamika, politik, kesenjangan ekonomi, serta pergeseran nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu faktor utama yang menjadi ketimpangan yaitu belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal yang belum menikmati pendidikan yang setara dengan daerah-daerah lain. Karena apabila pendidikan disebarluaskan secara merata maka akan memudahkan warga negara dalam membuka peluang untuk mengembangkan potensinya baik dalam pengendalian diri, membangun kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kesetaraan pendidikan menjadi solusi dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, individu dapat memaksimalkan potensinya secara intelektual, emosional, dan sosial. Lebih jauh lagi, pendidikan adalah alat untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong inklusi dan memperkuat akses yang setara terhadap peluang pembangunan (Rasyid, 2024). Namun, seiring dengan meningkatnya minat terhadap isu lingkungan hidup, pendidikan juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong keberlanjutan. Pendidikan membantu individu menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap dan perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan manusia secara ekonomi, namun juga sarana menjaga keseimbangan ekologi dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi demografi, ekonomi, politik, sosial budaya dan geografis masing-masing wilayah. Kondisi demikian juga berlaku untuk wilayah Indonesia terpencil dan kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar). Di Indonesia, wilayah yang mengalami kasus serupa terjadi di perbatasan Entikong Sanggau Kalimantan Barat dan Pulau-Pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau. Akses transportasi, listrik dan koneksi internet yang buruk menjadikan sulit meratanya kualitas pendidikan. Apalagi, Indonesia seringkali mengalami pergantian kurikulum yang menyesuaikan kebijakan Menteri pendidikan yang selalu berubah, dengan menyesuaikan kabinet Presiden Indonesia. Akibatnya, daerah terpencil sangat lambat dalam berkembang dan menyesuaikan kurikulum pendidikan yang baru (Tempo, 2023; Abduh *et al*, 2022).

Saat ini, kurikulum terbaru yang diimplementasikan di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dalam sistem pembelajaran yang semakin mengasah kompetensi murid dan kreativitas guru selaku tenaga pengajar. Sekolah negeri dan swasta di beberapa daerah sudah mulai merata menerapkan kurikulum yang menggunakan teknologi dalam setiap media pembelajarannya. Teknologi dan jaringan internet yang

sengaja dirancang dalam sistem belajar-mengajar di kelas dan diterapkan dalam pengumpulan tugas menciptakan kebiasaan baru dalam pembelajaran (kemdikbud.go.id, 2024). Kondisi tersebut menjadikan wilayah terpencil belum mampu dalam menerapkan Kurikulum Merdeka lantaran kurangnya akses internet dan sumber daya guru yang cakap dalam menggunakan teknologi (Suroso, 2024).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi literatur mengenai peningkatan kesetaraan akses pendidikan di daerah terpencil. Zed dalam penelitian mengatakan bahwa sebuah metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dalam pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Dengan mengkaji referensi secara kualitatif dan berfokus membahas mengenai tema yang digagas oleh penulis melalui berbagai sumber bacaan atau referensi berupa buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang relevan dari hasil penelitian dengan materi serupa.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, serta dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat ketimpangan pada ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan yang menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan akses melalui beberapa program tetapi kesenjangan tetap terasa, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, kualitas tenaga pendidik, serta teknologi masih terbatas di beberapa wilayah terpencil. Anak-anak dari keluarga kurang mampu juga sering kali terhambat karena biaya tambahan di luar pendidikan formal. Selain itu, ketimpangan gender juga menjadi isu, meskipun telah ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun terdapat stigma dan hambatan budaya yang membatasi kesetaraan akses bagi semua.

Indonesia hingga saat ini masih mengalami ketidakmerataan dalam bidang pendidikan, hal tersebut ditandai dengan masih sulitnya akses layanan pendidikan khususnya di daerah terpencil. Masalah ketidakmerataan tersebut dimulai dengan persebaran pendidik yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai dan kurang terjaminnya kesejahteraan pendidik (Rosmana, 2022). Kondisi tersebut harus segera diperbaiki karena akan berpengaruh terhadap angka *Human Development Index* (HDI), terbukti berdasarkan informasi dari humas development yang dimuat oleh CNN Indonesia, *United Nations Development Programme* (UNDP) melaporkan bahwa angka *Human Development Index Indonesia* menempati urutan ke 113. Angka tersebut mengalami penurunan dari HDI di tahun 2014 yang sebelumnya menempati urutan ke 110.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat sekitar 4,2 juta hingga 4,6 juta anak usia 7-18 tahun tidak mengenyam pendidikan formal, terdiri dari anak yang belum pernah sekolah dan yang sudah bersekolah namun putus. Angka ini menunjukkan tantangan signifikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak yang belum

memperoleh akses pendidikan yang memadai. Selain itu, data juga memperlihatkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal. Di daerah tertinggal atau terpendek, rata-rata lama pendidikan penduduk hanya sekitar 7 tahun, sementara di wilayah maju mencapai 12 tahun.

Masalah ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia ini sangat kompleks dan berakar pada berbagai faktor, salah satu faktornya yaitu terbatasnya sumber daya dan infrastruktur di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut, pendidikan juga sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan keterbatasan guru atau pendidik yang berkualitas. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperbaiki akses pendidikan yang berada di wilayah-wilayah yang terpendek atau tertinggal.

Faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin memprihatinkan sehingga terjadinya ketidak merataan pendidikan, yaitu (Zulkarnaen, 2023):

1. Rendahnya sarana fisik
Misalnya banyak sekali gedung-gedung sekolah yg sudah tak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan penggunaan fasilitas yg tidak di manfaatkan serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar.
2. Rendahnya kualitas guru kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
3. Rendahnya kesejahteraan guru
Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja.
4. Rendahnya prestasi siswa
Dengan peristiwa yang di atas sangat berdampak kepada mahasiswa dengan prestasi siswa menjadi rendah disebabkan seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.
5. Kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa
Hal ini menjadi sangat wajar sekarang dikalangan dinas pendidikan, sehingga masyarakat yang pedalaman kurang tersentuh, kurang diperhatikan dan menjadi hal yang biasa.
6. Rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja
Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah ketidak serasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang harapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja.
7. Mahalnya biaya pendidikan Biaya pendidikan bermutu itu mahal, inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayainya di karenakan ekonomi yang rendah.

Kemudian faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidaksetaraan akses pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu (Septiana, 2024):

1. Hambatan fisik, dimana banyak wilayah pedesaan dan daerah terpendek yang sulit diakses karena minimnya sarana transportasi. Akibatnya, anak-anak di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mencapai sekolah.
2. Faktor ekonomi, faktor ini juga berperan besar dalam membatasi akses pendidikan. Karena banyak keluarga di Indonesia yang berada dalam kondisi miskin, sehingga kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.
3. Keterbatasan fasilitas (sarana dan prasarana), keterbatasan fasilitas ini juga menjadi hambatan dalam akses pendidikan. Banyak sekolah di wilayah terpendek atau tertinggal

- yang mengalami kekurangan fasilitas yang layak, seperti gedung, komputer buku dan alat pembelajaran, tenaga pengajar yang berkualitas dan fasilitas lainnya.
4. Kualitas kurikulum yang tidak merata, faktor ini juga dapat mempengaruhi karena beberapa daerah mungkin tidak memiliki akses kurikulum yang relevan dan terkini, sehingga peserta didik di daerah tertentu tidak mendapatkan pendidikan yang sebanding dengan daerah lain.
 5. Kesenjangan teknologi, faktor ini juga dapat mempengaruhi karena penggunaan teknologi dalam pendidikan masih terbatas, terutama di daerah terpencil atau tertinggal yang mengakibatkan anak-anak tidak dapat memanfaatkan sumber daya belajar yang secara optimal.
 6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, kurangnya keterlibatan masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi karena dukungan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Di Indonesia, sistem pendidikan selalu disesuaikan dengan politik dan birokrasi yang ada. Namun ini bukanlah masalah utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih penting adalah bagaimana sistem dilaksanakan di lapangan, termasuk ketidaksamaan pendidikan terutama di daerah tertinggal. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia sangat rumit. Setiap kali terjadi perubahan kebijakan, kurikulum dan sistem pendidikan pun seringkali diadaptasi agar sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang berkuasa. Meskipun demikian, tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan bukan terletak pada perubahan sistem yang bersifat administratif, melainkan pada implementasinya di lapangan. Salah satu masalah terbesar adalah ketidaksamaan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, yang masih jauh dari standar yang ada di perkotaan. Ketidakmerataan akses pendidikan di wilayah yang terpencil masih menjadi kendala yang besar terutama dalam hal kualitas sarana dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan.

Ketidakmerataan pendidikan ini terjadi dikalangan masyarakat miskin Indonesia. Bagi banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendidikan tidak selalu menjadi prioritas utama. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan yang dianggap lebih mendesak untuk dipenuhi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan memiliki tingkat pendapatan yang rendah seringkali menjadi penghambat akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Faktor-faktor yang berkaitan dengan uang dan keuangan bertanggung jawab atas ketidakmerataan ini. Biaya yang dikeluarkan oleh seorang sebanding dengan tingkat pendidikan mereka, dimana keluarga miskin sering kali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis di beberapa tingkatan, masih ada biaya tambahan seperti seragam, buku, alat tulis dan kegiatan ekstrakurikuler yang memberatkan keluarga kurang mampu.

Pemerintah bersama beberapa organisasi swasta telah berupaya mengurangi kesenjangan di daerah terpencil (Sari, 2025). Solusi tersebut melalui berbagai program kebijakan, antara lain (1) SM-3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, Terpencil), dengan mengirimkan lulusan sarjana untuk mengajar di daerah tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan; (2) Peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dengan memberikan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik; dan (3) Indonesia Mengajar, sebuah program yang diprakarsai oleh Anies Baswedan, dimana para pengajar muda di kirim ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan pendidikan berkualitas, dan menginspirasi masyarakat. Ketiga program ini adalah bagian dari upaya pemerintah dan

organisasi non-pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di daerah, dengan harapan dapat meningkatkan akses pendidikan lebih merata dan memberdayakan masyarakat setempat.

SIMPULAN

Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, telah berdampak luas pada keterbelakangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasarasan untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No 39 tahun 1999.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal. Upaya seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas pendidik, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan adalah langkah konkret yang dapat diambil. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat berkurang, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan jurnal ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan jurnal ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Mohamad., Basiru, Andika, Angga., Narayana, Melly, Wulandari., Fauzi, Rohman. (2022). Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Menceri Cigudeg Kabupaten Bogor. *Jurnal Citizenship Virtues*. 2 (1): 291-300.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Anak yang Tidak Sekolah di Indonesia.
- Bahri, S. (2025). Kembali, Nyawa Anak SD Dipertaruhkan di Jembatan. Diakses dari: <http://foto.detik.com/readfoto/2012/03/26/143618/1876475/157/2/kembalinyawa-anak-sddipertaruhkan-dijembatan>.
- Maulido, Safiq., Karmijah, Popi., Rahmi, Vinanda. (2024). Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*. 198-208.
- Rahmadi, Imam, Fitri. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*. 7 (1): 75-84.

- Rasyid,A.Ramli. (2024). Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Manusia dan Berkelanjutan di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol 8 No. 3, h. 57-65.
- Rosmana, Primanita Sholihah. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, Vol. 6, No. 2, h. 405–418.
- Sari, Tanti Nurmala. (2025). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah Dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6 No. 4, h. 1732-1740.
- Septiana,Yudha Maya. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol.. 2, No. 6, h. 162-169.
- Suroso, Edy. (2024). *Daerah 3 T Terus Diupayakan Mendapat Akses Kurikulum Merdeka*. Diakses pada 22 Juli 2024.
- Zulkarnaen. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0”*.